



PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan OPD yang dipimpinnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Berita Negara 2020/Nomor 1781) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.



Jambi, 31 Desember 2025

PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. H. KEMAS MUHAMMAD FUAD, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19731212 199302 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	v
NERACA	vi
LAPORAN OPERASIONAL	viii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penulisan Atas Laporan Keuangan	4
BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	5
2.1. Ekonomi Makro	5
2.1.1. Kondisi Perekonomian dan Arah kebijakan ekonomi Makro	5
2.2. Kebijakan Keuangan	6
2.3. Pencapaian Target Kinerja	6
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	24
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	24
3.2. Hambatan Realisasi dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah ditetapkan	25

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	29
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	29
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	29
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	29
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	30
BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	31
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	31
5.2. Neraca	31
5.3. Laporan Operasional	44
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas	45
BAB VI. INFORMASI NON KEUANGAN	47
6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas	47
6.2. Struktur Organisasi	47
6.4. Informasi Lainnya	48
BAB VII. PENUTUP	49
LAMPIRAN	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jambi, 31 Desember 2025

PENGUNA ANGGARAN,

Drs. H. KEMAS MUHAMMAD FUAD, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19731212 199302 1 001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2025			REALISASI 2024
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	
1	PENDAPATAN	231.056.500,00	346.174.000,00	149,82	195.967.500,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	231.056.500,00	346.174.000,00	149,82	195.967.500,00
	Retribusi Daerah	231.056.500,00	346.174.000,00	149,82	195.967.500,00
	Jumlah PENDAPATAN	231.056.500,00	346.174.000,00	149,82	195.967.500,00
2	BELANJA DAERAH	22.037.270.682,00	20.961.665.197,00	95,11	21.240.423.159,00
	BELANJA OPERASI	21.802.720.620,00	20.727.603.197,00	95,06	21.231.177.159,00
	Belanja Pegawai	12.989.346.703,00	12.164.302.884,00	93,64	12.971.315.826,00
	Belanja Barang dan Jasa	5.118.939.917,00	4.950.300.313,00	96,70	4.963.583.333,00
	Belanja Subsidi	3.694.434.000,00	3.613.000.000,00	97,79	3.296.278.000,00
	BELANJA MODAL	234.550.062,00	234.062.000,00	99,79	9.246.000,00
	Belanja Peralatan Dan Mesin	234.550.062,00	234.062.000,00	99,79	9.246.000,00
	Jumlah Belanja	22.037.270.682,00	20.961.665.197,00	95,11	21.240.423.159,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.806.214.182,00)	(20.615.491.197,00)	94,53	(20.989.423.653,00)



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	9.816.576.219,01	10.769.552.865,70
1,1	ASET LANCAR	92.229.874,00	89.998.999,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	35.999,00
1.1.12	Persediaan	92.229.874,00	89.963.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	92.229.874,00	89.998.999,00
1,3	ASET TETAP	9.724.346.345,01	10.679.553.866,70
1.3.02	Peralatan dan Mesin	17.656.809.962,00	17.975.527.375,32
1.3.03	Gedung dan Bangunan	14.213.447.714,00	14.063.952.714,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.212.000,00	129.212.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(22.302.123.330,99)	(21.516.138.222,62)
	JUMLAH ASET TETAP	9.724.346.345,01	10.679.553.866,70
1.5.04	Aset Lain-lain	13.900.000,00	13.900.000,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(13.900.000,00)	(13.900.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00

	JUMLAH ASET	9.816.576.219,01	10.769.552.865,70
2	KEWAJIBAN	19.810.073,00	21.695.399,00
2,1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19.810.073,00	21.695.399,00
2.1.06	Utang Belanja	19.810.073,00	21.695.399,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19.810.073,00	21.695.399,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	19.810.073,00	21.695.399,00
3	EKUITAS	9.797.321.146,01	10.747.857.466,70
3,1	EKUITAS	9.797.321.146,01	10.747.857.466,70
3.1.01.02	Surplus/deficit- LO	(21.332.330.264,21)	(21.896.193.471,47)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	20.616.010.198,00	20.989.673.653,00
	JUMLAH EKUITAS	9.797.321.146,01	10.747.857.466,70
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9.817.131.219,01	10.769.552.865,70



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	346.174.000,00	250.999.506,00	95.174.494,00	37,92
7,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	346.174.000,00	250.999.506,00	95.174.494,00	37,92
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	346.174.000,00	250.999.506,00	95.174.494,00	37,92
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	346.174.000,00	250.999.506,00	95.174.494,00	37,92
	JUMLAH PENDAPATAN	346.174.000,00	250.999.506,00	95.174.494,00	37,92
8	BEBAN	21.678.504.264,21	22.147.192.977,47	(468.688.713,26)	(2,12)
8,1	BEBAN OPERASI	20.727.446.997,00	21.173.673.181,80	(446.226.184,80)	(2,11)
8.1.01	Beban Pegawai	12.164.302.884,00	12.971.315.826,00	(807.012.942,00)	(6,22)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.950.144.113,00	4.906.076.355,80	44.064.757,20	0,90
8.1.04	Beban Subsidi	3.613.000.000,00	3.296.278.000,00	316.722.000,00	9,61
	JUMLAH BEBAN OPERASI	20.727.446.997,00	21.173.673.181,80	(446.226.184,80)	(2,11)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	951.057.267,21	973.519.795,67	(22.462.528,46)	(2,31)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	760.123.777,94	776.454.478,50	(16.330.700,11)	(2,10)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	187.703.189,27	193.835.017,62	(6.131.828,35)	(3,16)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.230.300,00	3.230.300,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	951.057.267,21	973.519.795,67	(22.462.528,46)	(2,31)
	JUMLAH BEBAN	21.678.504.264,21	22.147.192.977,47	(468.688.713,26)	(2,12)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(21.332.330.264,21)	(21.896.193.471,47)	563.863.207,26	(2,58)



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025**



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	10.747.857.466,70	11.654.292.701,84
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(21.332.330.264,21)	(21.896.193.471,47)
RK PPKD	20.616.010.198,00	20.989.423.653,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(234.216.254,48)	334.583,33
EKUITAS AKHIR	9.797.321.146,01	10.747.857.466,70

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Barang pada OPD.

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran Tahun 2025 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

a. Pendapatan

Pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 231.056.500,00 sedangkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 346.174.000,00 sehingga persentase realisasi pendapatan sebesar 149,82 %.

b. Belanja

Belanja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 22.037.270.682,00 sedangkan realisasi belanja adalah sebesar Rp. 20.961.665.197,00 sehingga persentase realisasi belanja mencapai 95,11 %.

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Tahun Anggaran 2025 yang di dalamnya mencakup Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal pelaporan.

Jumlah Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 9.816.576.219,01 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 92.229.874,00, Aset Tetap sebesar Rp. 9.724.346.345,01, serta Aset Lainnya sebesar Rp. 0,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 19.810.073,00 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. Rp. 19.810.073,00, sedangkan jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 9.797.321.146,00.

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Dalam penyajian atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar.

Jambi, 31 Desember 2025.

PENGUNA ANGGARAN,



Drs. H. KEMAS MUHAMMAD FUAD, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19731212 199302 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Gubernur (Pergub) Jambi tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang utama adalah Pergub No. 57 Tahun 2011 beserta berbagai perubahannya, yang kemudian diperbarui dengan Pergub No. 4 Tahun 2024 dan Pergub No. 27 Tahun 2024, mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah, dengan acuan utama pada peraturan perundang-undangan di atasnya seperti Permendagri dan PP terkait pengelolaan keuangan daerah. Bahwa pengelolaan keuangan Provinsi Jambi dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

SKPD selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2025 untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas.

Memperatnggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuntasi dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antargenerasi (intergeneration equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan OPD serta hasil-hasil yang telah ditetapkan.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana OPD menandai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh OPD selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi OPD, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran negara republic Indonesia 4286);
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- c. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
- f. Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- g. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang system informasi keuangan daerah.
- h. Peraturan pemerintah 57 Tahun 2025 tentang hibah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- p. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi.
- q. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 Tentang

- Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);
- r. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika Penulisan Atas Laporan Keuangan

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Atas Laporan Keuangan
- 1.4. Entitas
- 1.5. Kebijakan Konversi

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.1.1. Kondisi Perekonomian dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Neraca
- 5.3. Laporan Operasional
- 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. Informasi Non Keuangan

- 6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas
- 6.2. Struktur Organisasi
- 6.3. Penggantian Manajemen Pemerintahan Dalam Tahun 2023
- 6.4. Informasi Lainnya

Bab VII. Penutup

LAMPIRAN

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Penyajian hasil indicator makro hasil pembangunan dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan dan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan apakah kebijakan-kebijakan public yang dijalankan selama ini telah sesuai dengan yang diharapkan.

Pencapaian indicator hasil pembangunan yang didapat disajikan dalam laporan keuangan Tahun 2025.

2.1.1. Kondisi Perekonomian dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah, kebijakan yang dilakukan dalam melanjutkan pembangunan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Jambi yaitu :

1. Kebijakan Hilirisasi Industri Pengolahan (Nilai Tambah)

Fokus pada Agroindustri: Pemprov Jambi mempercepat hilirisasi untuk mengubah ekspor bahan mentah menjadi produk bernilai tambah (olahan karet, minyak sawit/CPO, produk turunan pinang dan kayu manis).

Pengembangan Industri Pengolahan: Mendorong industri pengolahan berbasis agroindustri untuk meningkatkan pendapatan daerah.

2. Penguatan Industri Kecil, Menengah, dan Besar

Sentra IKM: Mengembangkan pusat-pusat (sentra) Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis kompetensi daerah.

Kemitraan Usaha: Mendorong kemitraan antara Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan industri skala besar untuk memperkuat rantai pasok.

Peningkatan Kualitas: Fasilitasi sertifikasi produk (SNI) dan peningkatan mutu barang melalui Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB).

3. Kebijakan Perdagangan dan Ekspor

Peningkatan Kinerja Ekspor: Mendorong ekspor nonmigas dengan melakukan terobosan ke pasar baru dan perbaikan proses manufaktur.

Tata Kelola Niaga: Memperbaiki tata kelola niaga komoditas perkebunan untuk meningkatkan kualitas ekspor.

Promosi Produk Lokal: Menyelenggarakan kegiatan seperti "Jambi Mantap Expo" sebagai fasilitator promosi produk UMKM.

4. Pembangunan Infrastruktur dan Regulasi

Kawasan Industri: Mengintegrasikan infrastruktur pendukung di kawasan industri untuk menarik investasi.

Dokumen Perencanaan (RPIP): Mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jambi 2020-2040 sebagai acuan pembangunan industri daerah.

5. Digitalisasi dan Pemantauan Pasar

Digitalisasi UMKM: Mendorong penggunaan teknologi digital dalam pemasaran produk.

Stabilitas Harga: Melakukan pengawasan barang beredar, pengendalian stok, dan monitoring harga barang kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas ekonomi.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan. Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya diuraikan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja).

2.3. Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian dan penyerapan realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang sumber pembiayaannya melalui APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

B. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

1. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Pedagangan.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Operasi Pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

2. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya.

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi.

C. Program Pengembangan Ekspor

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Citra Produk Ekspor.

D. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

1. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

2. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan Layanan Kalibrasi
- b. Pengembangan Layanan Pengujian
- c. Pemantauan Mutu Produk

3. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai parameter ketentuan Perlindungan Konsumen dan tertib niaga.

E. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi.

A.I. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 322.556.347,50,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 318.084.558,50,- atau 98,61% dan realisasi fisik 100%.

Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dana (input) yang dialokasikan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 261.140.034,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 256.678.255,00,- atau 98,29% dan realisasi fisik 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersusunnya rencana kerja dan terlaksananya rapat koordinasi program dan kegiatan tahunan sehingga terencanaanya program dan kegiatan dinas sebagai acuan dalam melaksanakan tupoksi.

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dana (input) yang dialokasikan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 61.416.313,50,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 61.406.303,00,- atau 99,98% dan realisasi fisik 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap beberapa kabupaten/kota di provinsi jambi guna mendukung capaian kinerja perangkat daerah di tahun 2026.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp.13.205.125.703,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.12.382.304.234,00,- atau 93,77% dan realisasi fisik 96,79%.

Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana (input) yang dialokasikan untuk Sub. Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.989.346.703,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 12.166.544.434,00,- atau 93,67% dan realisasi fisik 97,10%. Keluaran (Output) yang diperoleh adalah tersedianya gaji dan tunjangan Pegawai atau ASN di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sehingga terciptanya kesejahteraan pegawai atau ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Dana (input) yang dialokasikan untuk Sub.kegiatan ini adalah sebesar Rp.190.380.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan

sebesar Rp.190.380.000,- atau 100% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan dan honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sehingga pelayanan administrasi keuangan berjalan lancar.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Dana (input) yang dialokasikan untuk Sub.kegiatan ini adalah sebesar Rp.25.399.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.25.379.800,00,- atau 99,92% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya rekonsiliasi keuangan pertriwulan/semesteran guna mendukung dalam penyusunan laporan keuangan dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2025.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 29.137.500,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 29.022.218,00,- atau 99,60% dan realisasi fisik 100%.

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Dana (input) yang dialokasikan untuk Sub.kegiatan ini adalah sebesar Rp.29.137.500,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.29.022.218,00,- atau 99,60% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya rekonsiliasi Aset pertriwulan/semesteran guna mendukung dalam penyusunan laporan keuangan dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2025.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 386.441.026,50,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 385.891.666,00,- atau 99,86% dan realisasi fisik 100%.

Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.**

Dana (Input) yang dialokasikan untuk Sub.Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 20.985.490,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 20.985.490,00,- atau 100% dan realisasi fisik 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianya alat-alat listrik untuk penerangan ruangan/gedung kantor sehingga memberikan penerangan untuk aktivitas kerja pegawai sehari-hari di ruang /gedung kantor dinas perindustrian dan dan perdagangan provinsi jambi.

b. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.**

Dana (Input) yang dialokasikan untuk Sub.Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 21.322.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 21.322.000,00,- atau 100% dan realisasi fisik 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianya alat tulis kantor (ATK) sehingga menunjang kelancaran kegiatan administrasi, pencatatan, penulisan, mencetak dokumen dan pengarsipan agar pekerjaan kantor lebih efisien, teratur, dan produktif.

c. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.**

Dana (Input) yang dialokasikan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 40.384.300,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 40.231.300,00,- atau 99,62% dan realisasi fisik 100%. Keluaran (Output) yang diperoleh adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan sehingga kelancaran kegiatan organisasi/kantor tercapai.

d. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.**

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0% dan realisasi fisik 0%. (tidak dianggarkan)

e. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 303.749.236,50,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 303.352.876,00,- atau 99,87% dan realisasi fisik 100%.

Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sehingga terjalinnya sinergitas dan sinkronisasi tugas dengan pihak-pihak terkait.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 83.892.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 83.831.000,00,- atau 99,93% dan realisasi fisik 100%.

Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 83.892.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 83.831.000,00,- atau 99,93% dan realisasi fisik 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah adanya pembelian berupa printer dan laptop guna mendukung kerja pegawai dinas perindag provinsi jambi.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 559.365.920,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 522.619.039,00,- atau 93,43% dan realisasi fisik 96,84%.

Adapun Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 172.375.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 170.384.000,00,- atau 98,84% dan realisasi fisik 100%.

Keluaran (output) yang diperoleh adalah pembayaran honorarium pegawai tidak tetap (PTT) dan pembelian benda pos seperti materai guna menunjang administrasi surat menyurat kantor.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 367.670.920,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 332.915.039,00,- atau 90,55% dan realisasi fisik 95,19%.

Keluaran (output) yang diperoleh adalah termanfaatkannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebagai penunjang kelancaran sarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 19.320.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 19.320.000,00,- atau 100% dan realisasi fisik 100%.

Keluaran (output) yang diperoleh adalah pembayaran honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (honorarium PPTK) guna menunjang kegiatan kantor.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 257.351.450,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 256.820.600,00,- atau 99,79% dan realisasi fisik 100%.

Adapun Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 164.771.450,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 164.632.600,00,- atau 99,92% dan realisasi fisik 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah pembayaran bahan bakar minyak (BBM) Kendaraan Dinas/operasional Roda 2 dan roda 4 dan pembayaran service/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4 sehingga dapat digunakan secara optimal.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan.

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 19.500.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 19.138.000,- atau 98,14% dan realisasi fisik 100% . Keluaran (output) yang diperoleh adalah pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 dan mutasi kendaraan roda 4 serta pergantian BPKB, STNK dan plat kendaraan roda 2, demi kelancaran dan

tertib dalam berkendara pada kendaraan dinas operasional dinas perindag prov.jambi.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 73.080.000,00, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 73.050.000,00,- atau 99,96% dan realisasi fisik 100%.

Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya pemeliharaan peralatan/mesin (elektronik) sehingga terpeliharanya peralatan elektronik yang dapat berfungsi secara optimal.

B.1. Realisasi Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

1. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Pedagangan.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 3.909.302.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 3.825.306.600,00,- atau 97,85% dan realisasi fisik 99,12%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 3.909.302.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 3.825.306.600,00,- atau 97,85% dan realisasi fisik 99,12%. Keluaran (Output) yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan pasar murah bahan pokok bersubsidi di 11 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi yang bekerja sama dengan Perum Bulog yang akan dibagikan kepada masyarakat di 11 Kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada saat bulan Ramadhan dan pengendalian inflasi bahan sembako bersubsidi (beras, cabe merah, cabe rawit dan bawang merah) dibeberapa pasar tradisional di kota jambi yang bekerjasama dengan perum bulog guna untuk membantu para masyarakat dalam pengendalian inflasi bahan sembako.

2. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 43.828.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 43.802.720,00,- atau 99,94% dan realisasi fisik 100%.

Adapun Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi.

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 43.828.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 43.802.720,00,- atau 99,94% dan realisasi fisik 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida dalam wilayah provinsi jambi terhadap pelaku usaha, dan distributor dalam tertib niaga, guna mengatasi ketersediaan dan pengendalian harga pupuk bersubsidi oleh pelaku usaha.

C.I. Realisasi Program Pengembangan Ekspor

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi.

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 59.808.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 59.733.300,00,- atau 99,88% dan realisasi fisik 100%.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini ini Rp. 59.808.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 59.733.300,00,- atau 99,88% dan realisasi fisik 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya pelatihan eksportir gunanya untuk para eksportir memahami tentang tata cara bagaimana meningkatkan ekspor dan tujuan negara yang mau ekspor.

D.I. Realisasi Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

1. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 194.837.200,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 192.832.021,00,- atau 98,97% dan realisasi fisik 100%.

Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 194.837.200,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 192.832.021,00,- atau 98,97% dan realisasi fisik 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah memfasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

2. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk diseluruh Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, masukan (input) dana sebesar Rp. 875.245.555,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 848.372.621,00,- atau 96,93% dan realisasi fisik 100%.

Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan Layanan Kalibrasi

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan ini sebesar Rp. 318.656.235,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 302.436.485,00,- atau 94,91% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah mensosialisasikan Laboratorium Kalibrasi ke Kabupaten/kota di Provinsi Jambi, guna bertambahnya pelanggan (perusahaan/instansi) yang ingin mengajukan kalibrasi ke UPTD BPSMB.

b. Pengembangan Layanan Pengujian

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan ini sebesar Rp. 541.460.947,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 530.987.136,- atau 98,07% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya assesmen oleh KAN dalam rangka mempertahankan Akreditasi Laboratorium Pengujian UPTD BPSMB dan tersedianya peralatan laboratorium, bahan penunjang dan bahan kimia sesuai standar atau metode yang diacu atau yang ditetapkan secara nasional dan internasional.

c. Pemantauan Mutu Produk

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan ini sebesar Rp. 15.128.373,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 14.949.000,00,- atau 98,81% dan fisik 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah melakukan sampling atau pembelian bahan uji komoditi ekspor yang tersebar diseluruh kabupaten/kota di provinsi jambi serta mengetahui mutu produk komoditi ekspor dengan cara melakukan pengujian bahan/contoh uji komoditi di laboratorium UPTD BPSMB Disperindag Prov.Jambi.

3. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 45.036.000,00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.025.400,00,- atau 99,98% dan realisasi fisik 100%.

Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai parameter ketentuan Perlindungan Konsumen.

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 45.036.000,00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.025.400,00,- atau 99,98% dan realisasi fisik 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa sehingga berkurangnya peredaran barang yang tidak ber-SNI dan barang strategis yang tidak memenuhi ketentuan.

E.1. Realisasi Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp.158.315.769,00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 158.315.400,- atau 100% dan fisik kegiatan 100%.

Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi.

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.158.315.769,00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 158.315.400,- atau 100% dan fisik kegiatan 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya Promosi dan Sosialisasi penggunaan produk dalam negeri sehingga meningkatnya kecintaan atau penghargaan masyarakat terhadap produk dalam negeri.

II. URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN

A. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

B. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan Yang dilaksanakan yaitu :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi.

C. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, adapun sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

A.I. Realisasi Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 1.840.352.211,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.745.917.535,00,- atau 94,87% dan realisasi fisik 97,39%.

Adapun seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. **Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.**

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 252.338.365,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 251.187.400,00,- atau 99,54% dan realisasi fisik 100%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya koordinasi, pembinaan dan monitoring usaha sabut kelapa di kabupaten/kota dan terlaksananya rencana pengembangan komoditi unggulan provinsi jambi yang tertuang dalam RPIK.

- b. **Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.**

Dana (input) yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 255.690.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 230.681.800,00,- atau 90,22% dan realisasi fisik 93,86%. Keluaran (output) yang diperoleh adalah terlaksananya bantuan alat untuk IKM Batik dan IKM jahit untuk perajin IKM di Kabupaten

/kota di Provinsi Jambi dan pendaftaran HKI merek untuk Para IKM di kabupaten kota di Provinsi Jambi.

c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.332.323.846,00,- dengan capaian realisasi keuangan Rp. 1.264.048.335,00,- atau 94,88% dengan realisasi fisik 97,57%. Keluaran (Output) yang diperoleh adalah:

1. Pelatihan olahan makanan

UMKM mampu menciptakan produk olahan makanan inovatif, memperluas varian kuliner khas jambi di pasaran dan meningkatkan daya tarik di mata konsumen

2. Pelatihan fashion/ desain

Berikut adalah hasil dari pelatihan fashion di Provinsi Jambi:

- Peningkatan Kualitas Desainer Muda dan UMKM: Pelatihan yang melibatkan perancang busana pemula dari berbagai kabupaten/kota di Jambi berhasil membekali peserta untuk menciptakan produk unggulan berbasis wastra (batik dan songket Jambi) agar lebih modern dan berdaya saing nasional maupun internasional.
- Wastra Jambi Naik Kelas: Hasil pelatihan menunjukkan inovasi pada penggunaan batik Jambi yang tidak lagi hanya berupa kain panjang, tetapi diolah menjadi produk fashion modern (busana siap pakai/ ready-to-wear) yang lebih praktis dan bergaya.
- Kolaborasi Kreatif dan Fashion Show: Pelatihan sering kali diakhiri dengan peragaan busana (fashion show), seperti Jambi Fashion Dignity dan Jambi Fashion Trend, di mana desainer lokal memamerkan hasil karya mereka (contoh: koleksi "Heritage in Motion" karya Rifda Rusli).
- Pengembangan Teknik Pewarnaan dan Motif: Pelatihan juga mencakup teknik ecoprint dengan pewarnaan alami seperti jernang, serta pengembangan motif batik baru yang terinspirasi dari kearifan lokal (seperti motif Bungo Pauh dan Batanghari).

- Penguatan Ekonomi Kreatif: Pelatihan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dan pemerintah setempat (Dekranasda) membantu pelaku UMKM fashion di Jambi untuk meningkatkan daya jual produk mereka, yang mendukung pergerakan ekonomi kreatif di bidang fashion dan kriya.

Contoh kegiatan yang menghasilkan dampak ini meliputi pelatihan desain fesyen oleh Hj. Hesti Haris di tahun 2025 yang melibatkan 24 peserta dari berbagai wilayah di Jambi.

3. Rakerda dekransda se kabupaten kota diprovinsi jambi dan temu perajin se provinsi jambi yang bertujuan membahas tentang program dekransda seluruh kabupaten/kota dan membahas tentang kendala, hambatan dan keberhasilan para IKM yang dicapai.

2. Kegiatan Penertiban Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp.38.676.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 38.613.935,00,- atau 99,84% dan realisasi fisik 100%.

Adapun Sub Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi.

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.38.676.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 38.613.935,00,- atau 99,84% dan realisasi fisik 100%. Keluaran (Output) yang diperoleh adalah terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Industri ke perusahaan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), CPO (minyak goreng), karet dan teh di kabupaten/kota se provinsi jambi. Dan terlaksananya verifikasi teknis dalam rangka pemberian rekomendasi teknis keperusahaan CPO,AMDK,karet dan teh di kabupaten/kota.

3. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, masukan (input) berupa dana sebesar Rp. 28.000.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 27.413.900,00,- atau 97,91% dan realisasi fisik 100%.

Adapun Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Dana (input) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 28.000.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 27.413.900,00,- atau 97,91% dan realisasi fisik 100%.. Keluaran (output) yang diperoleh adalah tersedianya data dan informasi industri nasional kewenangan Provinsi lingkup Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi guna mempermudah dalam menyampaikan data dan informasi yang jelas, tepat dan akuntabel ke perusahaan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian dan sasaran.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Untuk melakukan pengukuran kinerja, telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

- 3.1.1. Indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
- 3.1.2. Indikator kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas :
 - a. Indikator input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dapat dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran)
 - b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
 - c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
 - d. Indikator benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan.
 - e. Indikator impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator yang berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja, input, output, dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasi kinerja yang dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja karena realisasi yang berbeda dengan rencana.

Sesuai dengan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, maka telah tersusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mempedomani arah dan kebijakan umum APBD yang merupakan hasil kesepakatan dengan DPRD Provinsi dengan diikuti program strategis dan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Dokumen tersebut merupakan acuan untuk penyusunan anggaran dari masing-masing unit kerja Pemerintah Provinsi yang disebut Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang akan dibahas lebih lanjut oleh panitia anggaran pemprov dan panitia anggaran DPRD Provinsi Jambi. Hasil pembahasan dari tim panitia anggaran dimaksud, maka disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD).

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

3.2.1. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang telah dilakukan, selanjutnya dapat dilakukan analisis terhadap berbagai permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja tersebut.

3.2.2. Hambatan Dan Permasalahan

Selama tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah merumuskan sasaran-sasaran strategisnya. Keberhasilan atau kegagalan sasaran pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi pada umumnya tidak banyak mengalami kegagalan, dan hal tersebut dapat dilihat pada tingkat pencapaian setiap program yang telah dilaksanakan pada umumnya telah mencapai 95,11%.

Beberapa permasalahan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi melalui Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Permasalahan Internal:

- a. Sistem dan Mekanisme Kerja: Belum sepenuhnya teratur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) yang baku, mempengaruhi efisiensi pelayanan.
- b. Kualitas SDM: Ketersediaan tenaga ahli di sektor industri masih menjadi kendala.

2. Pengembangan Industri Unggulan:

- a. Permodalan & SDM: UMKM industri kreatif (batik, tenun, makanan) sulit mengakses pembiayaan dan peningkatan kualitas SDM.
- b. Inovasi & HKI: Kurangnya inovasi produk dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk produk unggulan.
- c. Promosi & Pemasaran: Kesulitan menembus pasar lebih luas dan bersaing di tingkat nasional/internasional.

3. Peningkatan Perdagangan Dalam & Luar Negeri:

Infrastruktur: Keterbatasan infrastruktur logistik dan transportasi yang mendukung kelancaran arus barang.

Distribusi: Efektivitas rantai distribusi, khususnya ke daerah terpencil dan luar negeri.

Ketergantungan Komoditas: Pasar masih bergantung pada komoditas tertentu (misalnya sawit, karet) dan perlu diversifikasi.

4. Pelayanan Publik:

Efisiensi & Transparansi: Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan, sertifikasi, dan pendampingan masih perlu dioptimalkan.

Digitalisasi: Implementasi layanan digital yang belum merata.

5. Isu Strategis: Identifikasi permasalahan strategis (seperti yang ada dalam Renstra Disperindag) seringkali tidak diikuti dengan solusi konkret dan anggaran yang memadai, menciptakan celah antara perencanaan dan pelaksanaan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi kedepan, maka yang diperlukan antara lain :

1. Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen dan penegakan hukum tentang UU Perlindungan Konsumen.
2. Peningkatan SDM IKM.
3. Ketersediaan bahan baku produksi.
4. Ketersediaan teknologi proses produksi.
5. Peran aktif tenaga fungsional industri.
6. Kerjasama dalam pembinaan usaha industri dengan semua stake holder.
7. Melaksanakan kegiatan Pelatihan Ekspor bagi IKM dan UMKM.
8. Peningkatan mutu komoditi ekspor.
9. Peningkatan SDM aparatur .
10. Peningkatan peran UPTD BPSMB dalam rangka pengujian mutu dan penerapan SNI wajib.
11. Mengoptimalisasi pengawasan dan koordinasi dengan BPOM Jambi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan barang beredar.
12. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan dana yang dialokasikan dan terjadwal ke daerah sasaran.

Disamping itu pula pada sisi administrasi pencapaian dan penyerapan realisasi kegiatan ada beberapa hal yang juga perlu untuk dilaksanakan antara lain :

- a. Pengaturan jadwal kegiatan, perlu disesuaikan antara jumlah kegiatan atau tingkat kesulitan dalam kegiatan tersebut dengan waktu dan dana yang tersedia, sehingga tidak ada kegiatan yang dipaksakan harus selesai atau tidak dapat terlaksana.
- b. Perlu percepatan persiapan kegiatan yaitu pengambilan langkah antisipasi yang cepat dan tepat, terutama dalam

proses pengadministrasian sebelum masuk tahap pelaksanaan.

- c. Bahwa setiap pengelola kegiatan sebaiknya mengetahui dan memahami betul core dari suatu kegiatan baik input, output dan outcomenya dan perlu diberikan asistensi khusus, mengenai apa yang perlu dilakukan dan yang menjadi kewajiban.
- d. Bahwa perlu dijadwalkan khusus pertemuan baik secara berkala maupun insidentil dengan pengelola kegiatan, untuk mengevaluasi kinerja proyek setiap bulannya.
- e. Bahwa setiap kegiatan perlu dibuatkan laporannya, termasuk rapat/pertemuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- f. Bahwa setiap bidang dan sekretariat sebaiknya membuat laporan semester dan laporan tahunan, untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga memudahkan menyusun laporan tahunan, laporan akuntabilitas dan penyusunan rencana kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
- g. Meningkatkan proyeksi (predictability) dan akuntabilitas (accountability).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada 2 entitas penyelenggaraan yaitu entitas akuntansi dan entitas pelapora keuangan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa Laporan Keuangan.

Sedangkan entitas akuntansi adalah satuan kerja pada perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja berupa laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis akrual (accrual basis) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas yang diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran atas pos-pos yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran E tentang Akuntansi dan Pelaporan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan telah mengacu kepada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KASDA. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) atau dengan kata lain Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

5.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KASDA. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Bakeuda selaku Bendahara Umum Daerah atau dengan kata lain belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi periode 31 Desember 2025 Terdiri dari Realisasi Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 346.174.000,00,- dan Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 20.961.665.197,00,- yang berupa Belanja Operasi sebesar Rp. 20.727.603.197,00,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 234.062.000,00

5.2. Neraca

5.2.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumberdaya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset lainnya.

Pengukuran/Penilaian Aset :

1. Persediaan;

Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksir pada saat perolehan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

4. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.

5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap dipakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

6. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebagai biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

- Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

5.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.2.3. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana diinvestasikan.

Posisi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang tercermin dalam Neraca periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Jumlah Aset sebesar Rp. 9.816.576.219,01 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.92.229.874,00 Aset tetap sebesar Rp.9.724.346.345,01 Dana Cadangan sebesar Rp. 0,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 0,00.

Jumlah Kewajiban sebesar Rp.19.810.073,00,- terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.19.810.073,00,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0,00

Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp. 9.797.321.146,01.

❖ Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran :

A. Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah

Berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Retribusi Daerah (Laboratorium UPTD BPSMB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selama periode tahun 2025 adalah sebesar Rp.346.174.000,00,- terdapat kenaikan target sebesar Rp. 95.174.494,00,- dari target tahun 2024 yaitu sebesar Rp.250.999.506,00,-.

B. Belanja

Realisasi Belanja

Secara garis besar, belanja terdiri dari dua bagian yakni belanja operasi dan belanja modal. Sesuai susunan APBD setelah perubahan, masing-masing bagian belanja tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam Belanja Operasi yang terdiri Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi dan Belanja Hibah sedangkan Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Anggaran dan realisasi masing-masing pos belanja sesuai susunan APBD tersebut, ***disajikan dalam lampiran mengenai Laporan Realisasi Anggaran.***

Dalam catatan atas laporan keuangan ini, disajikan informasi rincian pos belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Belanja dilakukan dengan pertimbangan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Belanja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja dapat dilihat dari Tabel-tabel berikut ini :

TABEL 1

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Uraian	Anggaran murni	Anggaran setelah perubahan	Realisasi belanja	Presentase
1	2	3	4	5=(4/3)x100%
APBD	23.468.324.128,00,-	22.037.270.682,00	20.961.665.197,00	95,11%
Pinjaman lain	-	-	-	-
Hibah	-	-	-	-
Rupiah murni				
Pendamping	-	-	-	-
PNBP	-	-	-	-
JUMLAH		22.037.270.682,00	20.961.665.197,00	95,11%

TABEL 2

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja

NomorUrut	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja
1	2	3	4
5	Belanja Daerah	22.037.270.682,00	20.961.665.197,00
5.1	Belanja Operasi	21.802.720.620,00	20.727.603.197,00
5.1.1	Belanja Pegawai	12.989.346.703,00	12.164.302.884,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.118.939.917,00	4.950.300.313,00
5.1.4	Belanja Subsidi	3.694.434.000,00	3.613.000.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	0,00	0,00
5.2	Belanja Modal	234.550.062,00	234.062.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234.550.062,00	234.062.000,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

TABEL 3

Rincian Anggaran dan Realisai Rincian Obyek Belanja

Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4
Belanja Pegawai	12.989.346.703,00	12.164.302.884,00	93,64
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.131.148.343,00	6.596.953.346,00	92,50
Belanja Gaji Pokok ASN	5.238.897.062,00	4.927.852.350,00	94,06
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	526.041.250,00	474.404.906,00	90,18
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	297.376.436,00	283.500.000,00	95,33
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	120.175.818,00	107.165.000,00	89,17
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	159.936.294,00	129.525.000,00	80,99
Belanja Tunjangan Beras ASN	269.168.564,00	248.038.500,00	92,15
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.335.028,00	13.244.080,00	99,32
Belanja Pembulatan Gaji ASN	142.518,00	62.199,00	43,64
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	403.708.228,00	372.668.386,00	92,31
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.903.612,00	10.123.157,00	85,04
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	55.226.892,00	30.369.768,00	54,99
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.858.198.360,00	5.567.349.538,00	95,03
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.695.217.560,00	2.675.645.973,00	99,27
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	92.011.766,00	81.220.952,00	88,27

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi KerjaASN	3.070.969.034,00	2.810.482.613,00	91,51
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	5.118.939.917,00	4.950.300.313,00	96,70
Belanja Barang	938.019.974,42	909.928.568,00	97,00
Belanja Barang Pakai Habis	930.945.174,42	902.853.872,00	96,98
Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi	7.074.800,00	7.074.696,00	99,99
Belanja Jasa	2.627.514.204,00	2.492.539.549,00	94,86
Belanja Jasa Kantor	2.482.363.900,00	2.361.780.289,00	95,14
Belanja sewa tanah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	8.450.000,00	85,35
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	133.250.304,00	120.309.260,00	90,28
Belanja Pemeliharaan	237.851.450,00	237.682.600,00	99,92
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	237.851.450,00	237.682.600,00	99,92
Belanja Perjalanan Dinas	1.313.054.288,58	1.307.649.596,00	99,58
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.313.054.288,58	1.307.649.596,00	99,58
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Belanja Subsidi	3.694.434.000,00	3.613.000.000,00	97,79

Belanja Subsidi kepada BUMN	3.694.434.000,00	3.613.000.000,00	97,79
Belanja Subsidi kepada BUMN	3.694.434.000,00	3.613.000.000,00	97,79
JUMLAH BELANJA OPERASI	21.802.720.620,00	20.727.603.197,00	95,06
BELANJA MODAL	234.550.062,00	234.062.000,00	99,79
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234.550.062,00	234.062.000,00	99,79
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	36.877.962,00	36.792.000,00	99,76
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	36.877.962,00	36.792.000,00	99,76
Belanja Modal Alat Laboratorium	146.576.100,00	146.235.000,00	99,76
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	146.576.100,00	146.235.000,00	99,76
Belanja Modal Komputer	51.096.000,00	51.035.000,00	99,88
Belanja Modal Peralatan Komputer	51.096.000,00	51.035.000,00	99,88
JUMLAH BELANJA MODAL	234.550.062,00	234.062.000,00	99,79

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai yaitu belanja yang dipergunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Honorarium PNS serta Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

2) Belanja Barang dan Jasa

- (1) Belanja barang yang dipergunakan untuk rutinitas perkantoran merupakan pembelian bahan pakai habis seperti Alat Tulis Kantor, Bahan Cetak, Alat Listrik, Bahan Alat Kebersihan, Bahan Kimia dan pakaian perlengkapan dinas serta Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
- (2) Belanja Jasa, dipergunakan untuk menunjang kegiatan perkantoran yang seperti belanja jasa tenaga non ASN, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim

Pelaksana Kegiatan, Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Tagihan Air, Listrik, Telepon/Internet, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja sewa, Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat dan Belanja perjalanan dinas dimasukkan dalam kelompok ini.

- 3) Belanja Subsidi di pergunakan untuk kegiatan Operasi Pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok seperti Cabe merah, Cabe Rawit, Bawang merah, bawang putih dan Minyak goreng bagi masyarakat kurang mampu dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Jambi.
- 4) Belanja Modal, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi (menambah aset OPD) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Output atas belanja modal tersebut menghasilkan barang/jasa, dan menambah nilai aset serta ekuitas dan diinvestasikan yang tercatat dalam neraca OPD.

Tabel 4
Rincian Realisasi Belanja Modal

Kode Rekening	Uraian Belanja modal (BM)	Setelah Perubahan	Realisasi Belanja
1	2	3	4
5.2.02	BM PERALATAN DAN MESIN	234.550.062,00	234.062.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	36.877.962,00	36.792.000,00
	Belanja Modal Alat Dapur	0	0
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	36.877.962,00	36.792.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	146.576.100,00	146.235.000,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	0	0
	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0	0
	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	146.576.100,00	146.235.000,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0	0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	51.096.000,00	51.035.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	51.096.000,00	51.035.000,00
	Jumlah Belanja modal	234.550.062,00	234.062.000,00

a. Tanah

Jumlah nilai tanah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,- terdiri dari :

- Nilai tanah per 31 Desember 2024	Rp. 0,-
- Mutasi tahun 2025	<u>Rp. 0,-</u>
Nilai tanah per 31 Desember 2025	Rp. 0,-
Nilai tanah per 31 Desember 2025 sebesar	Rp. 0,- merupakan total nilai tanah, terdiri dari :
- Tanah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah	Rp. 0,-

b. Peralatan dan Mesin

Jumlah nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 17.656.809.962,00 terdiri dari :

- Nilai Peralatan & Mesin per 31-12- 2024	<u>Rp. 17.975.527.375,32</u>
- Belanja Tahun 2025 (bertambah)	Rp. 234.062.000,00
- Dibawah kapitalisasi pengadaan Tahun 2025	(Rp. 3.996.000,00)
- Dibawah kapitalisasi koreksi lebih saji asset tetap	(Rp. 548.783.413,32)
- Penghapusan Aset Tetap	Rp. 0,00
Nilai Akhir peralatan dan Mesin 31-12-2025	<u>Rp. 17. 656.809.962,00</u>

c. Gedung dan Bangunan

Jumlah nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 14.063.952.714,00 terdiri dari :

- Nilai Bangunan dan Gedung per 31-12-2024	Rp 14.063.952.714,00
- Mutasi masuk dari Dinas PUPR Tahun 2025	Rp. 149.495.000,00
- Reklas Tahun 2025	<u>Rp. 0,00</u>
Nilai Bangunan dan Gedung per 31-12-2025	Rp. 14.213.447.714,00

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jumlah nilai jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.129.212.000,- tersebut :

- Nilai jalan,irigasi dan jaringan per 31-12-2024	Rp. 129.212.000,00
- Belanja tahun 2025 (bertambah)	Rp. 0,00
- Dibawah kapitalisasi 2025 (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Nilai jalan,irigasi dan jaringan per 31-12-2025	Rp. 129.212.000,00

e. Aset Tetap Lainnya

Jumlah nilai aset lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 27.000.000,00 terdiri dari :

- Nilai aset tetap lainnya per 31-12-2024	Rp. 27.000.000,00
- Belanja Tahun 2025 (bertambah)	Rp. 0,00
- Dibawah kapitalisasi (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Nilai Tetap Lainnya per 31-12-2025	Rp. 27.000.000,00

f. Aset Lain-lain

Jumlah nilai aset lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp.13.900.000,00 terdiri dari :

- Nilai aset lain-lain per 31-12-2024	Rp. 13.900.000,00
- Mutasi Tamah Kurang 2025	<u>Rp. 0,00</u>
Nilai aset lain-lain per 31-12-2025	Rp. 13.900.000,00

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. Nihil merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dibayarkan untuk perolehan aset tetap berupa jembatan, jalan dan bangunan gedung.

❖ **Penjelasan Atas Pos-pos Neraca**

➤ Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 Saldo kas pada bendahara pengeluaran yang terdiri dari:

- Saldo kas di Bendahara per 31-12-2024	Rp. 35.999,00,-
- Saldo kas di Bendahara per 31-12-2025	Rp. 0,00

Catatan : saldo kas dibendahara tahun 2024 Kurang Setor pada kegiatan mekanisme pencairan tambahan uang persediaan (STS TU).

➤ Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 9.724.346.345,01 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar Aset Tetap

Nama Aset Tetap	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	17.975.527.375,32	234.062.000,00	552.779.413,32	17.656.809.962,00
Gedung dan Bangunan	14.063.952.714,00	149.495.000,00	-	14.213.447.714,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	129.212.000,00	-	-	129.212.000,00
Aset Lainnya	27.000.000,00	-	-	27.000.000,00
Jumlah	32.195.692.089,32	483.557.000,00	552.779.413,32	32.026.469.676,00

Catatan :

1. Untuk akun aset peralatan dan mesin adanya penambahan dari pembelian (APBD) selama Tahun Anggran 2025 Rp. 234.062.000,00 dan mutasi masuk dari Dinas PUPR Tahun 2025 Rp. 149.495.000,00 sehingga Total penambahan Aset Tetap Rp. 483.557.000,00
2. Terdapat barang dibawah kapitalisasi (ekstracountable) dari hasil pembelian Tahun 2025 sebesar Rp. 3.996.000,00 dan pengurangan asset tetap pada Neraca akun peralatan dan mesin sebesar Rp. 548.783.413,32 dari koreksi lebih saji asset tetap yang harga perolehanya di bawah kapitalisasi sehingga total pengurangan ATPM Rp. 552.779.413,32

➤ **Ekuitas Dana Lancar**

Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar/jangka pendek, yang terdiri atas :

- Cadangan Piutang Rp. 0,-
- Cadangan Persediaan Rp. 92.229.874,00.

5.3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Laporan Operasional salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan operasional pada Dinas Perindustrian perdagangan provinsi jambi periode 31 desember 2025 sebagai berikut :

Jumlah Pendapatan Rp. 346.174.000,00 sementara Jumlah Beban Rp. 21.678.504.264,21 terdiri dari Beban Operasional Rp. 20.727.446.997,00 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 951.057.267,21 sehingga adanya defisit LO Rp. (21.332.330.264,21).

7.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas Pemerintah Daerah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/Defisit Laporan Operasional.

Laporan Perubahan Ekuitas pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat dirinci sebagai berikut :

- 1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 10.747.857.466,70 (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Rupiah) yang merupakan jumlah ekuitas tahun 2025.
- 2. Surplus / Defisit LO sebesar (Rp. 21.332.330.264,21) (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Koma Dua Puluh Satu Rupiah) merupakan selisih yang akan mengurangi jumlah ekuitas.
- 3. Ekuitas Akhir merupakan selisih antara Ekuitas Awal dengan Surplus/Defisit LO dan Koreksi Ekuitas lainnya dengan rincian :

Ekuitas awal.....	Rp. 10.747.857.466,70
Defisit - LO (Rp. 21.332.330.264,21)	
Koreksi Rp.	0,00
	(Rp. 21.332.330.264,21)

Kewajiban	Rp. 20.616.010.198,00	
Lain-lain	<u>Rp. 234.216.254,48</u>	
		<u>(Rp. 950.536.320,69)</u>
Ekuitas akhir.....		Rp. 9.797.321.146,01

- ❖ Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

Adanya koreksi lebih saji sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp. 123.062.937,97 pada laporan barang milik daerah semester I Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan atau diserap yaitu :

 1. Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena Refocusing Realokasi Kegiatan dan Pergeseran mendahului Perubahan APBD Tahun 2025.
 2. Adanya efisiensi dana dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi berdomisili di Jalan Letjen Suprpto Nomor 28 Telanaipura, Jambi, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016.

6.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2020, Susunan atau Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - 1. Subbag Keuangan dan Aset.
 - 2. Subbag Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah.
 - 2. Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri.
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri.
- d. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam.
 - 2. Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi.
 - 3. Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian.
- e. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
 - 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.
 - 3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).
- f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen.
 - 2. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
 - 3. Seksi Tertib Niaga.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BPSMB terdiri dari :
 - 1. Subbag Tata Usaha
 - 2. Seksi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi
 - 3. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

6.3. Informasi Lainnya

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa :

- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pada Laporan Realisasi Anggaran : Dari target pendapatan yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar Rp. 250.999.506,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Rupiah) terealisasi sebesar Rp.346.174.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) atau 149,82% dan pada sisi Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 22.037.270.682,00 (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 20.961.665.197,00 (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 95,11%.

- Neraca :

Posisi Aset pada akhir tahun 2025 sebesar Rp. 9.816.576.219,01 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Koma Satu Rupiah) bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. 10.769.552.865,70 (Sepuluh milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Rupiah) terdapat Penurunan sebesar Rp. 952.976.646,69 atau 9,71%.

Selama Tahun 2025 terdapat Kewajiban sebesar Rp. 19.810.073,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 9.797.321.146,01 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Enam Koma Satu Rupiah).

- Laporan Operasional (LO) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah :

1. Pendapatan – LO sebesar Rp. 346.174.000,00 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO sebesar Rp. 346.174.000,00 yang berupa :
Pendapatan Retribusi Daerah - LO sebesar Rp. 346.174.000,00

2. Beban sebesar Rp. 21.678.504.264,21

terdiri dari :

a. Beban Pegawai	Rp. 12.164.302.884,00
b. Beban Barang dan Jasa	Rp. 4.950.144.113,00
c. Beban Subsidi	Rp. 3.613.000.000,00
d. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 760.123.777,94
e. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. 187.703.189,27
f. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 3.230.300,00

Sehingga terdapat selisih atau Surplus/Defisit LO sebesar
Rp. 21.332.330.264,21

Jambi, 31 Desember 2025

PENGGUNA ANGGARAN,




Drs. H. KEMAS MUHAMMAD FUAD, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731212 199302 1 001

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan OPD yang dipimpinnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Berita Negara 2020/Nomor 1781) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.



Jambi, 31 Desember 2025

PENGUNA ANGGARAN,

Drs. H. KEMAS MUHAMMAD FUAD, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19731212 199302 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	v
NERACA	vi
LAPORAN OPERASIONAL	viii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penulisan Atas Laporan Keuangan	4
BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	5
2.1. Ekonomi Makro	5
2.1.1. Kondisi Perekonomian dan Arah kebijakan ekonomi Makro	5
2.2. Kebijakan Keuangan	6
2.3. Pencapaian Target Kinerja	6
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	24
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	24
3.2. Hambatan Realisasi dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah ditetapkan	25

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	29
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	29
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	29
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	29
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	30
BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	31
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	31
5.2. Neraca	31
5.3. Laporan Operasional	44
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas	45
BAB VI. INFORMASI NON KEUANGAN	47
6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas	47
6.2. Struktur Organisasi	47
6.4. Informasi Lainnya	48
BAB VII. PENUTUP	49
LAMPIRAN	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jambi, 31 Desember 2025

PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. H. KEMAS MUHAMMAD FUAD, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19731212 199302 1 001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2025			REALISASI 2024
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	
1	PENDAPATAN	231.056.500,00	346.174.000,00	149,82	195.967.500,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	231.056.500,00	346.174.000,00	149,82	195.967.500,00
	Retribusi Daerah	231.056.500,00	346.174.000,00	149,82	195.967.500,00
	Jumlah PENDAPATAN	231.056.500,00	346.174.000,00	149,82	195.967.500,00
2	BELANJA DAERAH	22.037.270.682,00	20.961.665.197,00	95,11	21.240.423.159,00
	BELANJA OPERASI	21.802.720.620,00	20.727.603.197,00	95,06	21.231.177.159,00
	Belanja Pegawai	12.989.346.703,00	12.164.302.884,00	93,64	12.971.315.826,00
	Belanja Barang dan Jasa	5.118.939.917,00	4.950.300.313,00	96,70	4.963.583.333,00
	Belanja Subsidi	3.694.434.000,00	3.613.000.000,00	97,79	3.296.278.000,00
	BELANJA MODAL	234.550.062,00	234.062.000,00	99,79	9.246.000,00
	Belanja Peralatan Dan Mesin	234.550.062,00	234.062.000,00	99,79	9.246.000,00
	Jumlah Belanja	22.037.270.682,00	20.961.665.197,00	95,11	21.240.423.159,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.806.214.182,00)	(20.615.491.197,00)	94,53	(20.989.423.653,00)



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	9.816.576.219,01	10.769.552.865,70
1,1	ASET LANCAR	92.229.874,00	89.998.999,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	35.999,00
1.1.12	Persediaan	92.229.874,00	89.963.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	92.229.874,00	89.998.999,00
1,3	ASET TETAP	9.724.346.345,01	10.679.553.866,70
1.3.02	Peralatan dan Mesin	17.656.809.962,00	17.975.527.375,32
1.3.03	Gedung dan Bangunan	14.213.447.714,00	14.063.952.714,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.212.000,00	129.212.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(22.302.123.330,99)	(21.516.138.222,62)
	JUMLAH ASET TETAP	9.724.346.345,01	10.679.553.866,70
1.5.04	Aset Lain-lain	13.900.000,00	13.900.000,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(13.900.000,00)	(13.900.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00

	JUMLAH ASET	9.816.576.219,01	10.769.552.865,70
2	KEWAJIBAN	19.810.073,00	21.695.399,00
2,1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19.810.073,00	21.695.399,00
2.1.06	Utang Belanja	19.810.073,00	21.695.399,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19.810.073,00	21.695.399,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	19.810.073,00	21.695.399,00
3	EKUITAS	9.797.321.146,01	10.747.857.466,70
3,1	EKUITAS	9.797.321.146,01	10.747.857.466,70
3.1.01.02	Surplus/deficit- LO	(21.332.330.264,21)	(21.896.193.471,47)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	20.616.010.198,00	20.989.673.653,00
	JUMLAH EKUITAS	9.797.321.146,01	10.747.857.466,70
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9.817.131.219,01	10.769.552.865,70



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	346.174.000,00	250.999.506,00	95.174.494,00	37,92
7,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	346.174.000,00	250.999.506,00	95.174.494,00	37,92
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	346.174.000,00	250.999.506,00	95.174.494,00	37,92
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	346.174.000,00	250.999.506,00	95.174.494,00	37,92
	JUMLAH PENDAPATAN	346.174.000,00	250.999.506,00	95.174.494,00	37,92
8	BEBAN	21.678.504.264,21	22.147.192.977,47	(468.688.713,26)	(2,12)
8,1	BEBAN OPERASI	20.727.446.997,00	21.173.673.181,80	(446.226.184,80)	(2,11)
8.1.01	Beban Pegawai	12.164.302.884,00	12.971.315.826,00	(807.012.942,00)	(6,22)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.950.144.113,00	4.906.076.355,80	44.064.757,20	0,90
8.1.04	Beban Subsidi	3.613.000.000,00	3.296.278.000,00	316.722.000,00	9,61
	JUMLAH BEBAN OPERASI	20.727.446.997,00	21.173.673.181,80	(446.226.184,80)	(2,11)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	951.057.267,21	973.519.795,67	(22.462.528,46)	(2,31)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	760.123.777,94	776.454.478,50	(16.330.700,11)	(2,10)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	187.703.189,27	193.835.017,62	(6.131.828,35)	(3,16)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.230.300,00	3.230.300,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	951.057.267,21	973.519.795,67	(22.462.528,46)	(2,31)
	JUMLAH BEBAN	21.678.504.264,21	22.147.192.977,47	(468.688.713,26)	(2,12)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(21.332.330.264,21)	(21.896.193.471,47)	563.863.207,26	(2,58)



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025**



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	10.747.857.466,70	11.654.292.701,84
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(21.332.330.264,21)	(21.896.193.471,47)
RK PPKD	20.616.010.198,00	20.989.423.653,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(234.216.254,48)	334.583,33
EKUITAS AKHIR	9.797.321.146,01	10.747.857.466,70

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Barang pada OPD.

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran Tahun 2025 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

a. Pendapatan

Pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 231.056.500,00 sedangkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 346.174.000,00 sehingga persentase realisasi pendapatan sebesar 149,82 %.

b. Belanja

Belanja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 22.037.270.682,00 sedangkan realisasi belanja adalah sebesar Rp. 20.961.665.197,00 sehingga persentase realisasi belanja mencapai 95,11 %.

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Tahun Anggaran 2025 yang di dalamnya mencakup Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal pelaporan.

Jumlah Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 9.816.576.219,01 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 92.229.874,00, Aset Tetap sebesar Rp. 9.724.346.345,01, serta Aset Lainnya sebesar Rp. 0,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 19.810.073,00 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. Rp. 19.810.073,00, sedangkan jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 9.797.321.146,00.

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Dalam penyajian atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar.

Jambi, 31 Desember 2025.

PENGUNA ANGGARAN,



Drs. H. KEMAS MUHAMMAD FUAD, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19731212 199302 1 001



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	231.056.500,00	346.174.000,00	149,82	250.999.506,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	231.056.500,00	346.174.000,00	149,82	250.999.506,00
4.1.02	Retribusi Daerah	231.056.500,00	346.174.000,00	149,82	250.999.506,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	231.056.500,00	346.174.000,00	149,82	250.999.506,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	765.000,00	0,00	250.999.506,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	231.056.500,00	345.409.000,00	149,49	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	231.056.500,00	346.174.000,00	149,82	250.999.506,00
	JUMLAH PENDAPATAN	231.056.500,00	346.174.000,00	149,82	250.999.506,00
5	BELANJA DAERAH	22.037.270.682,00	20.961.665.197,00	95,11	21.240.423.159,00
5.1	BELANJA OPERASI	21.802.720.620,00	20.727.603.197,00	95,06	21.231.177.159,00
5.1.01	Belanja Pegawai	12.989.346.703,00	12.164.302.884,00	93,64	12.971.315.826,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.131.148.343,00	6.596.953.346,00	92,50	6.904.403.708,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.238.897.062,00	4.927.852.350,00	94,06	5.207.287.700,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	526.041.250,00	474.404.906,00	90,18	487.099.516,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	297.376.436,00	283.500.000,00	95,33	273.700.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	120.175.818,00	107.165.000,00	89,17	85.680.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	159.936.294,00	129.525.000,00	80,98	149.495.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	269.168.564,00	248.038.500,00	92,14	258.104.880,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.335.028,00	13.244.080,00	99,31	12.002.726,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	142.518,00	62.199,00	43,64	67.466,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	403.708.228,00	372.668.386,00	92,31	388.165.613,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.903.612,00	10.123.157,00	85,04	10.700.148,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	55.226.892,00	30.369.768,00	54,99	32.100.659,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	35.236.641,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.858.198.360,00	5.567.349.538,00	95,03	5.751.672.118,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.695.217.560,00	2.675.645.973,00	99,27	2.255.952.917,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	92.011.766,00	81.220.952,00	88,27	69.224.659,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.070.969.034,00	2.810.482.613,00	91,51	3.426.494.542,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	315.240.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	315.240.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.118.939.917,00	4.950.300.313,00	96,70	4.963.583.333,00
5.1.02.01	Belanja Barang	938.019.974,42	909.928.568,00	97,00	772.185.320,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	930.945.174,42	902.853.872,00	96,98	772.185.320,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	7.074.800,00	7.074.696,00	99,99	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.627.514.204,00	2.492.539.549,00	94,86	2.455.561.753,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.482.363.900,00	2.361.780.289,00	95,14	2.355.529.793,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.900.000,00	8.450.000,00	85,35	6.849.360,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	133.250.304,00	120.309.260,00	90,28	93.182.600,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	237.851.450,00	237.682.600,00	99,92	291.752.200,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	237.851.450,00	237.682.600,00	99,92	291.752.200,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.313.054.288,58	1.307.649.596,00	99,58	1.439.084.060,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.313.054.288,58	1.307.649.596,00	99,58	1.439.084.060,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	3.694.434.000,00	3.613.000.000,00	97,79	3.296.278.000,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	3.694.434.000,00	3.613.000.000,00	97,79	3.296.278.000,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	3.694.434.000,00	3.613.000.000,00	97,79	3.296.278.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	21.802.720.620,00	20.727.603.197,00	95,06	21.231.177.159,00
5.2	BELANJA MODAL	234.550.062,00	234.062.000,00	99,79	9.246.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234.550.062,00	234.062.000,00	99,79	9.246.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	36.877.962,00	36.792.000,00	99,76	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	36.877.962,00	36.792.000,00	99,76	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	146.576.100,00	146.235.000,00	99,76	9.246.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	146.576.100,00	146.235.000,00	99,76	9.246.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	51.096.000,00	51.035.000,00	99,88	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	51.096.000,00	51.035.000,00	99,88	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
	JUMLAH BELANJA MODAL	234.550.062,00	234.062.000,00	99,79	9.246.000,00
	JUMLAH BELANJA	22.037.270.682,00	20.961.665.197,00	95,11	21.240.423.159,00
	SURPLUS/DEFISIT	(21.806.214.182,00)	(20.615.491.197,00)	94,53	(20.989.423.653,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(21.806.214.182,00)	(20.615.491.197,00)	94,53	(20.989.423.653,00)



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	346.174.000,00	250.999.506,00	95.174.494,00	37,92
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	346.174.000,00	250.999.506,00	95.174.494,00	37,92
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	346.174.000,00	250.999.506,00	95.174.494,00	37,92
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	346.174.000,00	250.999.506,00	95.174.494,00	37,92
	JUMLAH PENDAPATAN	346.174.000,00	250.999.506,00	95.174.494,00	37,92
8	BEBAN	21.678.504.264,21	22.147.192.977,47	(468.688.713,26)	(2,12)
8.1	BEBAN OPERASI	20.727.446.997,00	21.173.673.181,80	(446.226.184,80)	(2,11)
8.1.01	Beban Pegawai	12.164.302.884,00	12.971.315.826,00	(807.012.942,00)	(6,22)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.950.144.113,00	4.906.079.355,80	44.064.757,20	0,90
8.1.04	Beban Subsidi	3.613.000.000,00	3.296.278.000,00	316.722.000,00	9,61
	JUMLAH BEBAN OPERASI	20.727.446.997,00	21.173.673.181,80	(446.226.184,80)	(2,11)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	951.057.267,21	973.519.795,67	(22.462.528,46)	(2,31)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	760.123.777,94	776.454.478,05	(16.330.700,11)	(2,10)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	187.703.189,27	193.835.017,62	(6.131.828,35)	(3,16)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.230.300,00	3.230.300,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	951.057.267,21	973.519.795,67	(22.462.528,46)	(2,31)
	JUMLAH BEBAN	21.678.504.264,21	22.147.192.977,47	(468.688.713,26)	(2,12)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(21.332.330.264,21)	(21.896.193.471,47)	563.863.207,26	(2,58)



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	10.747.857.466,70	11.654.292.701,84
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(21.332.330.264,21)	(21.896.193.471,47)
RK PPKD	20.616.010.198,00	20.989.423.653,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(234.216.254,48)	334.583,33
EKUITAS AKHIR	9.797.321.146,01	10.747.857.466,70



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	9.816.576.219,01	10.769.552.865,70
1.1	ASET LANCAR	92.229.874,00	89.998.999,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	35.999,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	35.999,00
1.1.12	Persediaan	92.229.874,00	89.963.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	92.229.874,00	89.998.999,00
1.3	ASET TETAP	9.724.346.345,01	10.679.553.866,70
1.3.02	Peralatan dan Mesin	17.656.809.962,00	17.975.527.375,32
1.3.03	Gedung dan Bangunan	14.213.447.714,00	14.063.952.714,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.212.000,00	129.212.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(22.302.123.330,99)	(21.516.138.222,62)
	JUMLAH ASET TETAP	9.724.346.345,01	10.679.553.866,70
1.5.04	Aset Lain-lain	13.900.000,00	13.900.000,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(13.900.000,00)	(13.900.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	9.816.576.219,01	10.769.552.865,70
2	KEWAJIBAN	19.810.073,00	21.695.399,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19.810.073,00	21.695.399,00
2.1.06	Utang Belanja	19.810.073,00	21.695.399,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	19.810.073,00	21.695.399,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	19.810.073,00	21.695.399,00
3	EKUITAS	9.797.321.146,01	10.747.857.466,70
3.1	EKUITAS	9.797.321.146,01	10.747.857.466,70
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(21.332.330.264,21)	(21.896.193.471,47)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	20.616.010.198,00	20.989.423.653,00
	JUMLAH EKUITAS	9.797.321.146,01	10.747.857.466,70
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9.817.131.219,01	10.769.552.865,70

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI JAMBI**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini :

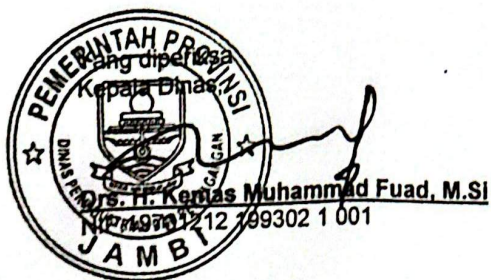
- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama : Lelia Budiati, S.H, M.H | 4. Nama : Muhammad Ichwan, SE., M.M |
| NIP : 19661213 199209 2 001 | NIP : 19770410 201101 1 002 |
| Jabatan : Pengendali Teknis | Jabatan : Anggota |
| 2. Nama : Rini Nucifera, S.H., M.H | 5. Nama : Hanibal Syartika, S.E., M.E |
| NIP : 19850828 201001 2 011 | NIP : 19850508 201001 1 021 |
| Jabatan : Ketua Tim | Jabatan : Anggota |
| 3. Nama : Hj. Juli Triarti, S.Pt | |
| NIP : 19720719 199803 2 003 | |
| Jabatan : Anggota | |

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Jambi Nomor : B-000.1.2_744 /ST/ITPROV-2/XII/2025 Tanggal 20 Desember 2025 setelah memperlihatkan surat bukti diri kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama lengkap : M. Zhuni Syahputra
NIP : 19850615 201001 1 004
Jabatan : Bendahara Penerimaan

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 29/KEP/GUB/BPKPD-6.3/2025 tanggal 13 Bulan Januari Tahun 2025, ditugaskan sebagai Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

a. Uang kertas dan uang logam	Rp.	0,-
b. SP2D dan alat pembayaran lainnya	Rp.	0,-
c. Saldo Bank	Rp.	0,-
d. Prangko, materai dan surat berharga lainnya	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-
e. Saldo menurut Buku Kas Umum	Rp.	0,-
f. Selisih positif/negative	Rp.	0,-



Bendahara Pengeluaran,

M. Zhuni Syahputra
NIP. 19850615 201001 1 004

Tim Pemeriksa :

1. Lelia Budiati, S.H, M.H
Nip. 19661213 199209 2 001
2. Rini Nucifera, S.H., M.H
Nip. 19850828 201001 2 011
3. Hj. Juli Triarti, S.Pt
Nip. 19720719 199803 2 003
4. Muhammad Ichwan, S.E., M.M
Nip. 19770410 201101 1 002
5. Hanibal Syartika, S.E., M.E
Nip. 19850508 201001 1 021

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI JAMBI**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama : Lelia Budiati, S.H, M.H | 4. Nama : Muhammad Ichwan, SE., M.M |
| NIP : 19661213 199209 2 001 | NIP : 19770410 201101 1 002 |
| Jabatan : Pengendali Teknis | Jabatan : Anggota |
| 2. Nama : Rini Nucifera, S.H., M.H | 5. Nama : Hanibal Syartika, S.E.,M.E |
| NIP : 19850828 201001 2 011 | NIP : 19850508 201001 1 021 |
| Jabatan : Ketua Tim | Jabatan : Anggota |
| 3. Nama : Hj. Juli Triarti, S.Pt | |
| NIP : 19720719 199803 2 003 | |
| Jabatan : Anggota | |

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Jambi Nomor : B-000.1.2_744 /ST/ITPROV-2/XII/2025 Tanggal 20 Desember 2025 setelah memperlihatkan surat bukti diri kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama lengkap : M. Zhuni Syahputra
NIP : 19850615 201001 1 004
Jabatan : Bendahara Penerimaan

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 29/KEP/GUB/BPKPD-6.3/2025 tanggal 13 Bulan Januari Tahun 2025, ditugaskan sebagai Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

a. Uang kertas dan uang logam	Rp.	0,-
b. SP2D dan alat pembayaran lainnya	Rp.	0,-
c. Saldo Bank	Rp.	0,-
d. Prangko, materai dan surat berharga lainnya	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-
e. Saldo menurut Buku Kas Umum	Rp.	0,-
f. Selisih positif/negative	Rp.	0,-



Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si
NIP. 19731212 199302 1 001

Bendahara Pengeluaran,

M. Zhuni Syahputra
NIP. 19850615 201001 1 004

Tim Pemeriksa :

1. Lelia Budiati, S.H, M.H
Nip. 19661213 199209 2 001
2. Rini Nucifera, S.H.,M.H
Nip. 19850828 201001 2 011
3. Hj. Juli Triarti, S.Pt
Nip. 19720719 199803 2 003
4. Muhammad Ichwan, S.E., M.M
Nip.19770410 201101 1 002
5. Hanibal Syartika, S.E.,M.E
Nip. 19850508 201001 1 021

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

PENUTUPAN BUKU KAS UMUM

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Buku Kas Umum ditutup sehubungan dengan adanya pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Jambi Nomor B-000.1.2_744/ST/ITPROV-2/XII/2025 Tanggal 20 Desember 2025, dengan keadaan sebagai berikut :

1. Menurut Buku :
 - a. Jumlah Penerimaan 01 Januari s.d 31 Desember 2025 Rp. 345.814.000,-
 - b. Jumlah Pengeluaran 01 Januari s.d 31 Desember 2025 Rp. 345.814.000,-

Saldo Menurut Buku Rp. 0,-
2. Menurut Kas :
 - a. Uang tunai Rp. 0,-
 - b. Saldo Bank Rp. 0,-
 - c. Surat-surat berharga Rp. 0,-

Saldo menurut kas Rp. 0,-
3. Selisih kurang/lebih Rp. 0,-
4. Penjelasan selisih : NIHIL.



Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si
NIP. 19711213 199302 1 001

Bendahara Pengeluaran,

M. Zhuni Syahputra
NIP. 19850615 201001 1 004

Tim Pemeriksa :

1. Lelia Budiati, S.H, M.H
Nip. 19661213 199209 2 001
2. Rini Nucifera, S.H.,M.H
Nip. 19850828 201001 2 011
3. Hj. Juli Triarti, S.Pt
Nip. 19720719 199803 2 003
4. Muhammad Ichwan, S.E., M.M
Nip.19770410 201101 1 002
5. Hanibal Syartika, S.E.,M.E
Nip. 19850508 201001 1 021

(*Relisner*)
(*Me*)
(*Yody*)
(*Cheth*)
(*Haidis*)

DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2025

No	Bulan	Uraian			Ket
		Penerimaan	Penyetoran	Saldo	
1.	Januari	Rp. 24.980.500,-	Rp. 24.980.500,-	Rp. -	
2.	Februari	Rp. 40.869.000,-	Rp. 40.869.000,-	Rp. -	
3.	Maret	Rp. 54.860.000,-	Rp. 54.860.000,-	Rp. -	
4.	April	Rp. 30.755.000,-	Rp. 30.755.000,-	Rp. -	
5.	Mei	Rp. 16.442.000,-	Rp. 16.442.000,-	Rp. -	
6.	Juni	Rp. 23.880.000,-	Rp. 23.880.000,-	Rp. -	
7.	Juli	Rp. 40.140.000,-	Rp. 40.140.000,-	Rp. -	
8.	Agustus	Rp. 17.249.000,-	Rp. 17.249.000,-	Rp. -	
9.	September	Rp. 30.876.000,-	Rp. 30.876.000,-	Rp. -	
10.	Oktober	Rp. 28.865.500,-	Rp. 28.865.500,-	Rp. -	
11.	November	Rp. 18.907.000,-	Rp. 18.907.000,-	Rp. -	
12.	Desember	Rp. 17.990.000,-	Rp. 17.990.000,-	Rp. -	
JUMLAH		Rp. 345.814.000,-	Rp. 345.814.000,-	Rp. -	



Mengetahui
Asisten Leleng Bendahara Penerimaan

Drs. H. Kemas Muhammad Ruad, M.Si
NIP. 19731212 199302 1 001

Bendahara Penerimaan

M. Zhuni Syahputra
NIP. 19850615 201001 1 004

DAFTAR REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN

Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2025

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
1.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Rp. 231.056.000,-	Rp. 345.814.000,-	149,67	Melebihi Target Rp. 114.758.000,-



Mengetahui

Asasmlangtung Bendahara Penerimaan

Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si
NIP. 19731212 199302 1 001

Bendahara Penerimaan

M. Zhuni Syahputra
NIP. 19850615 201001 1 004

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada Hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama : Lelia Budiati, S.H, M.H | 4. Nama : Muhammad Ichwan, SE., M.M |
| NIP : 19661213 199209 2 001 | NIP : 19770410 201101 1 002 |
| Jabatan : Pengendali Teknis | Jabatan : Anggota |
| 2. Nama : Rini Nucifera, S.H., M.H | 5. Nama : Hanibal Syartika, S.E.,M.E |
| NIP : 19850828 201001 2 011 | NIP : 19850508 201001 1 021 |
| Jabatan : Ketua Tim | Jabatan : Anggota |
| 3. Nama : Hj. Juli Triarti, S.Pt | |
| NIP : 19720719 199803 2 003 | |
| Jabatan : Anggota | |

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Jambi Nomor : B-000.1.2_744/ST/ITPROV-2/XII/2025 Tanggal 20 Desember 2025 setelah memperlihatkan surat bukti diri kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : Samsuri, SE
NIP : 19831116 200903 1 002
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Yang dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 29/KEP/GUB/BPKPD-6.3/2025 tanggal 13 Bulan Januari Tahun 2025 ditugaskan pengurusan/pengelolaan uang Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan/pengelolaan ini ditemui sebagai berikut :

a. Uang kertas dan uang logam	Rp	0,00
b. SP2D dan alat pembayaran lainnya	Rp	0,00
c. Saldo Bank	Rp	0,00
d. Perangko, Materai dan surat berharga yang diizinkan	Rp	0,00
Total	Rp	0,00
Saldo uang menurut Buku Kas Umum	Rp	0,00
Selisih kurang antara saldo Kas & Buku	Rp	0,00

Tim Pemeriksa :

1. Lelia Budiati, S.H, M.H
Nip. 19661213 199209 2 001
2. Rini Nucifera, S.H.,M.H
Nip. 19850828 201001 2 011
3. Hj. Juli Triarti, S.Pt
Nip. 19720719 199803 2 003
4. Muhammad Ichwan, S.E., M.M
Nip.19770410 201101 1 002
5. Hanibal Syartika, S.E.,M.E
Nip. 19850508 201001 1 021



Bendahara Pengeluaran,

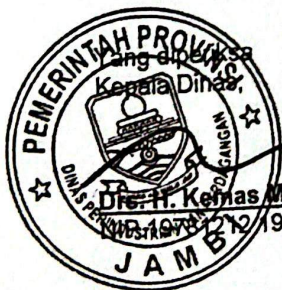
Samsuri, SE
NIP.19831116 200903 1 002

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

1. Keterangan tentang perbedaan kas : Nihil
2. Tempat penyimpanan uang : 1) Bank Jambi Rekening Nomor 101003019
2) Brankas Merk Crown
3. Tempat penyimpanan kunci kedua : Bendahara Pengeluaran Sdr. Samsuri, SE
4. Catatan tentang mengerjakan buku : Telah sesuai Peraturan Menteri Dalam No. 77 Th 2020
5. Catatan tentang penutupan Buku Kas : BKU ditutup tiap akhir bulan dan diketahui oleh Umum menurut peraturan yang telah ditetapkan dan keterangan-keterangan yang dilukiskan oleh Bendahara atasan langsung
6. Pemeriksaan kas yang terakhir dikerjakan oleh : Belum dilakukan pemeriksaan kas oleh Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran/Pengguna Anggaran
7. Pertelaahan tentang terdapatnya surat : -
berharga
8. Catatan tentang penyetoran penerimaan : PPN/PPH ke Kas Negara.

No	Jenis Penerimaan	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Sisa (Rp)
1.	PPH 21	539.098.885,00	539.098.885,00	-
2.	PPH 22	3.569.554,00	3.569.554,00	-
3.	PPH 23	3.141.883,00	3.141.883,00	-
4.	PPn	35.110.202,00	35.110.202,00	-
	Jumlah	580.920.524,00	580.920.524,00	-

9. Hal-hal lain untuk mempertimbangkan : caranya menguasai kas dan cara mengerjakan dianggap perlu



Bendahara Pengeluaran,

Samsuri, SE
NIP.19831116 200903 1 002

Tim Pemeriksa :

1. Lelia Budiati, S.H, M.H
Nip. 19661213 199209 2 001
2. Rini Nucifera, S.H.,M.H
Nip. 19850828 201001 2 011
3. Hj. Juli Triarti, S.Pt
Nip. 19720719 199803 2 003
4. Muhammad Ichwan, S.E., M.M
Nip.19770410 201101 1 002
5. Hanibal Syartika, S.E.,M.E
Nip. 19850508 201001 1 021

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Desember 2025
 Nama Penutup Kas : Tim Inspektorat
 Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 2025

Jumlah penerimaan tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2025 Rp. 21.078.373.865,00
 Jumlah pengeluaran tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2025 Rp. 21.078.373.865,00

Saldo Buku Rp 0,00

Terdiri dari :

1. Saldo Kas Rp 0,00

Terdiri dari :

1) Uang kertas	lembar x Rp100.000,00	Rp	0,00
Uang kertas	lembar x Rp 50.000,00	Rp	0,00
Uang kertas	lembar x Rp 20.000,00	Rp	0,00
Uang kertas	lembar x Rp 10.000,00	Rp	0,00
Uang kertas	lembar x Rp 5.000,00	Rp	0,00
Uang kertas	lembar x Rp 2.000,00	Rp	0,00
Uang kertas	lembar x Rp 1.000,00	Rp	0,00

2) Uang Logam	keping x Rp 500,00	Rp	0,00
Uang Logam	keping x Rp 200,00	Rp	0,00
Uang Logam	keping x Rp 100,00	Rp	0,00

Jumlah Rp 0,00

2. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan
 Organisasi/SP2D wesel cek, Saldo Bank
 Materai dan sebagainya

Rp 0,00

Jumlah

Rp 0,00
 Rp 0,00

3. Perbedaan negatif/positif

Penjelasan Selisih : NIHIL.

Jambi, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran



Samsuri, SE
 NIP.19831116 200903 1 002

Yang diperiksa
 Pengantar Anggaran



Ors. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si
 NIP.198711212 199302 1 001

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI JAMBI

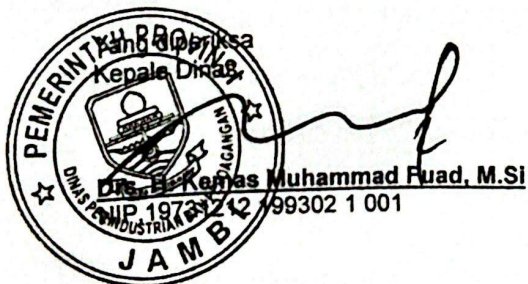
REALISASI KEUANGAN

Tahun Anggaran
Unit Organisasi

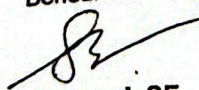
: 2025
: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

a. Jumlah Dana dalam DPA		Rp. 22.037.270.682,00
b. SP2D yang telah diterima s/d masa yang diperiksa :		
1. SP2D UP& GU	Rp. 2.330.681.805,00	
2. SP2D TU	Rp. 2.968.147.626,00	
3. SP2D LS (Gaji+Tj.Jabatan+Barang/Jasa)	Rp. 15.779.544.434,00	
Jumlah		Rp. 21.078.373.865,00
c. Saldo awal		Rp.
d. Jumlah uang yang tersedia		Rp 21.078.373.865,00
e. Pengeluaran s/d pemeriksaan :		
1. SPJ UP & GU	Rp. 2.303.898.226,00	
2. SPJ TU	Rp. 2.880.464.087,00	
3. STS TU	Rp. 87.683.539,00	
STS UP	Rp. 26.783.579,00	
4. SP2D LS (Gaji+Tj.Jabatan+Barang/Jasa)	Rp. 15.779.544.434,00	
Jumlah		Rp. 21.078.373.865,00
f. Saldo/sisa		Rp. 0,00
g. - Penerimaan lain-lain (PPN/PPH)	Rp. 580.920.524,00	
- Pengeluaran lain-lain (PPN/PPH)	Rp. 580.920.524,00	
Penerimaan yang belum disetor		Rp 0,00
h. Saldo / saldo buku		Rp 0,00
i. Sisa kas menurut kas opname pada tanggal pemeriksaan		Rp 0,00
j. Selisih positif / negative		Rp 0,00

Penjelasan Selisih : NIHIL



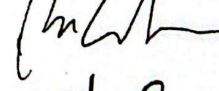
Bendahara Pengeluaran,


Samsuri, SE
NIP.19831116 200903 1 002

Tim Pemeriksa :

1. Lelia Budiati, S.H, M.H
Nip. 19661213 199209 2 001
2. Rini Nucifera, S.H.,M.H
Nip. 19850828 201001 2 011
3. Hj. Juli Triarti, S.Pt
Nip. 19720719 199803 2 003
4. Muhammad Ichwan, S.E., M.M
Nip.19770410 201101 1 002
5. Hanibal Syartika, S.E.,M.E
Nip. 198505058 201001 1 021




PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SALDO PERSEDIAAN
Per 31 Desember 2025

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

No.	Uraian	Jumlah	Nilai
1	Bahan Kimia	43,65	Rp 90.602.874,00
2	Bahan Bakar dan Pelumas	-	Rp -
3	Bahan Baku	-	Rp -
4	Bahan/Bibit Tanaman	-	Rp -
5	Bahan Lainnya	-	Rp -
6	Suku Cadang Alat Laboratorium	-	Rp -
7	Alat Tulis Kantor	45,00	Rp 1.627.000,00
8	Bahan Cetak	-	Rp -
9	Benda Pos	-	Rp -
10	Bahan Komputer	-	Rp -
11	Alat Listrik	-	Rp -
12	Perlengkapan Dinas	-	Rp -
13	Suvenir/Cendera Mata	-	Rp -
14	Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	Rp -
15	Obatan Lainnya	-	Rp -
16	Diserahkan kepada Masyarakat	-	Rp -
17	Pakan-Natura	-	Rp -
18	Natura dan Pakan Lainnya	-	Rp -
19	Makanan dan Minuman Rapat	-	Rp -
20	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	Rp -
Total		88,65	Rp 92.229.874,00

Jambi, 31 Desember 2025

Tim Inspektorat

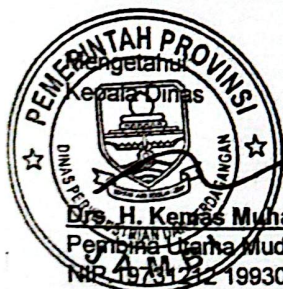
1. Lelia Budiati, S.H, M.H
NIP. 19661213 199209 2 001

2. Rini Nucifera, S.H.,M.H
NIP. 19850828 201001 2 011

3. Hj. Juli Triarti, S.Pt
NIP. 19720719 199803 2 003

4. Muhammad Ichwan, S.E., M.M
NIP.19770410 201101 1 002

5. Hanibal Syartika, S.E.,M.E
NIP. 19850508 201001 1 021



Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si
Kepala Dinas
NIP. 19731212 199302 1 001

Pengurus Barang Pengguna

Yogi Eka Pramana, SE
Penata

NIP. 19890619 201504 1 003

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

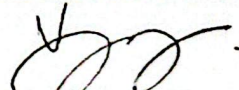
I. Rekap Persediaan Tahun 2025

NO	REKENING BELANJA	URAIAN	Nilai Persediaan per 31 Desember 2025				
			Saldo Awal (2025)	Mutasi		Jmh	Saldo Akhir (SM 2 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) + (4) + (5)
	A.	ASET LANCAR	89.963.000	902.853.872	(900.505.496)	88,65	92.229.874
	1.	Persediaan	89.963.000	902.853.872	(900.505.496)	88,65	92.229.874
1	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	84.423.000	39.099.380	(32.838.004)	43,65	90.602.874
2	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	7.988.600	(7.988.600)	-	-
3	5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	-	2.657.340	(2.657.340)	-	-
4	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	1.278.000	(1.278.000)	-	-
5	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	13.823.445	(13.823.445)	-	-
6	5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	-	2.700.000	(2.700.000)	-	-
7	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.540.000	32.247.300	(36.160.300)	45,00	1.627.000
8	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	159.571.715	(159.571.715)	-	-
9	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	2.690.000	(2.690.000)	-	-
10	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	2.640.000	(2.640.000)	-	-
11	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	20.985.490	(20.985.490)	-	-
12	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	1.910.000	(1.910.000)	-	-
13	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir /Cendera Mata	-	4.500.000	(4.500.000)	-	-
14	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	58.868.274	(58.868.274)	-	-
15	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	-	-	-	-
16	5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	240.982.268	(240.982.268)	-	-
17	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	-	4.879.560	(4.879.560)	-	-
18	5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	-	123.000	(123.000)	-	-
19	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	272.320.000	(272.320.000)	-	-
20	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	33.589.500	(33.589.500)	-	-
		TOTAL PERSEDIAAN DARI BELANJA	89.963.000	902.853.872	(900.505.496)	88,65	92.229.874
		PENERIMAAN HIBAH PERSEDIAAN	-	-	-	-	-
		NIHIL...	-	-	-	-	-
		TOTAL PENERIMAAN HIBAH PERSEDIAAN	-	-	-	-	-


Mengeski
KEPALA DINAS
Drs. H. Kemal Muhammad Fauzi, M.Si
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jambi
NIP. 19871212 199302 1 001

Jambi, 31 Desember 2025

PENGURUS BARANG PENGGUNA


Yogi Eka Pramana, SE
Penata
NIP. 19890619 201504 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Legend Suprpto No. 28, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 82842, 82320, 85529, 84979, 83137. Fax. (0741) 82627. Kotak Pos 153

SURAT KETERANGAN

Nomor : 443 /DISPERINDAG-1.2/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. KEMAS MUHAMMAD FUAD, M. Si
NIP. : 19731212 199302 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Selaku Pengguna Barang

Dengan ini menerangkan bahwa:

No	Nomor Kodifikasi	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah (Rp)	Keterangan
PERALATAN DAN MESIN					
1.	1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			
	1.3.02.06.01	Alat Studio			
	1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	63.929.101	Tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi	
	1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	60.500.123		
GEDUNG DAN BANGUNAN					
2.	1.3.03.01	Bangunan Gedung			
	1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja			
	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	169.000.000	Tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi	
	1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	153.856.324		

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, aset tersebut memenuhi kriteria sebagai aset ekstrakomptabel karena memiliki nilai perolehan di bawah batas kapitalisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan reklasifikasi aset dimaksud ke dalam Beban Ekstrakomptabel.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Jambi
Pada tanggal 30 Juni 2025



KEPALA DINAS,

Drs. H. KEMAS MUHAMMAD FUAD, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP.19731212 199302 1 001

Kode		Nama	di	ki	ketertangan
1.3.02.01.03.0001		Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin Peralatan Tukang Besi	671.816.351,24	671.816.351,24	Kembali lebih dari Aset Tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi
1.3.02.01.03.0001	1.3.02.01.03.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin Peralatan Tukang Besi	700.000,00		
1.3.02.01.03.0001	1.3.02.01.03.0001	Peralatan Tukang Besi		700.000,00	
1.3.02.01.03.0002	1.3.02.01.03.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin Peralatan Bengkel Khusus Peladani	75.000,00		
1.3.02.01.03.0002	1.3.02.01.03.0002	Peralatan Bengkel Khusus Peladani		75.000,00	
1.3.02.01.03.0003	1.3.02.01.03.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur Alat Ukur Universal	7.453.000,00		
1.3.02.01.03.0003	1.3.02.01.03.0003	Alat Ukur Universal		7.453.000,00	
1.3.02.01.03.0004	1.3.02.01.03.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur Alat Ukur/Pembanding	1.530.875,00		
1.3.02.01.03.0004	1.3.02.01.03.0004	Alat Ukur/Pembanding		1.530.875,00	
1.3.02.01.03.0005	1.3.02.01.03.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur Takaran Lainnya	6.590.000,00		
1.3.02.01.03.0005	1.3.02.01.03.0005	Takaran Lainnya		6.590.000,00	
1.3.02.01.03.0006	1.3.02.01.03.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	28.692.261,06		
1.3.02.01.03.0006	1.3.02.01.03.0006	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		28.692.261,06	
1.3.02.01.03.0007	1.3.02.01.03.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor Alat Kantor Lainnya	797.500,00		
1.3.02.01.03.0007	1.3.02.01.03.0007	Alat Kantor Lainnya		797.500,00	
1.3.02.01.03.0008	1.3.02.01.03.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Mebel	192.509.198,26		
1.3.02.01.03.0008	1.3.02.01.03.0008	Mebel		192.509.198,26	
1.3.02.01.03.0009	1.3.02.01.03.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Alat Pengukur Waktu	1.615.000,00		
1.3.02.01.03.0009	1.3.02.01.03.0009	Alat Pengukur Waktu		1.615.000,00	
1.3.02.01.03.0010	1.3.02.01.03.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Alat Pembersih	1.200.000,00		
1.3.02.01.03.0010	1.3.02.01.03.0010	Alat Pembersih		1.200.000,00	
1.3.02.01.03.0011	1.3.02.01.03.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Alat Pendingin	14.074.720,00		
1.3.02.01.03.0011	1.3.02.01.03.0011	Alat Pendingin		14.074.720,00	
1.3.02.01.03.0012	1.3.02.01.03.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Alat Dapur	1.575.000,00		
1.3.02.01.03.0012	1.3.02.01.03.0012	Alat Dapur		1.575.000,00	
1.3.02.01.03.0013	1.3.02.01.03.0013	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.455.250,00		
1.3.02.01.03.0013	1.3.02.01.03.0013	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		25.455.250,00	
1.3.02.01.03.0014	1.3.02.01.03.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Alat Pemadam Kebakaran	150.000,00		
1.3.02.01.03.0014	1.3.02.01.03.0014	Alat Pemadam Kebakaran		150.000,00	
1.3.02.01.03.0015	1.3.02.01.03.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	49.335.744,00		
1.3.02.01.03.0015	1.3.02.01.03.0015	Meja Kerja Pejabat		49.335.744,00	
1.3.02.01.03.0016	1.3.02.01.03.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	950.000,00		
1.3.02.01.03.0016	1.3.02.01.03.0016	Meja Rapat Pejabat		950.000,00	
1.3.02.01.03.0017	1.3.02.01.03.0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.310.000,00		
1.3.02.01.03.0017	1.3.02.01.03.0017	Kursi Kerja Pejabat		7.310.000,00	
1.3.02.01.03.0018	1.3.02.01.03.0018	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi Alat Komunikasi Telephone	575.000,00		
1.3.02.01.03.0018	1.3.02.01.03.0018	Alat Komunikasi Telephone		575.000,00	
1.3.02.01.03.0019	1.3.02.01.03.0019	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Alat Kedokteran Umum	480.000,00		
1.3.02.01.03.0019	1.3.02.01.03.0019	Alat Kedokteran Umum		480.000,00	
1.3.02.01.03.0020	1.3.02.01.03.0020	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Alat Kedokteran Bedah	890.000,00		
1.3.02.01.03.0020	1.3.02.01.03.0020	Alat Kedokteran Bedah		890.000,00	
1.3.02.01.03.0021	1.3.02.01.03.0021	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	5.239.000,00		
1.3.02.01.03.0021	1.3.02.01.03.0021	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan		5.239.000,00	
1.3.02.01.03.0022	1.3.02.01.03.0022	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Alat Laboratorium Model Hidrolika	1.000.000,00		
1.3.02.01.03.0022	1.3.02.01.03.0022	Alat Laboratorium Model Hidrolika		1.000.000,00	
1.3.02.01.03.0023	1.3.02.01.03.0023	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	16.053.000,00		
1.3.02.01.03.0023	1.3.02.01.03.0023	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi		16.053.000,00	
1.3.02.01.03.0024	1.3.02.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	3.888.000,00		
1.3.02.01.03.0024	1.3.02.01.03.0024	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan		3.888.000,00	
1.3.02.01.03.0025	1.3.02.01.03.0025	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Alat Laboratorium Umum	3.470.000,00		
1.3.02.01.03.0025	1.3.02.01.03.0025	Alat Laboratorium Umum		3.470.000,00	
1.3.02.01.03.0026	1.3.02.01.03.0026	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Alat Laboratorium Mikrobiologi	7.015.000,00		
1.3.02.01.03.0026	1.3.02.01.03.0026	Alat Laboratorium Mikrobiologi		7.015.000,00	
1.3.02.01.03.0027	1.3.02.01.03.0027	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Alat Laboratorium Hematologi	10.720.500,00		
1.3.02.01.03.0027	1.3.02.01.03.0027	Alat Laboratorium Hematologi		10.720.500,00	

1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	17.865.740,00		
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian		17.865.740,00	
1.3.07.01.08.0051	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	1.625.000,00		
1.3.02.08.01.0051	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia		1.625.000,00	
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	57.036.000,00		
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain		57.036.000,00	
1.3.07.01.08.0067	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	3.100.000,00		
1.3.02.08.02.0003	General Laboratory Tool		3.100.000,00	
1.3.07.01.08.0068	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils	16.884.000,00		
1.3.02.08.02.0004	Glassware Plastic/Utensils		16.884.000,00	
1.3.07.01.08.0073	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	11.350.000,00		
1.3.02.08.03.0003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar		11.350.000,00	
1.3.07.01.08.0074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	14.817.500,00		
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan		14.817.500,00	
1.3.07.01.08.0100	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment	29.330.000,00		
1.3.02.08.05.0004	Meteorological Equipment		29.330.000,00	
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.512.000,00		
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer		6.512.000,00	
2	1.3.07.01.08.0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	654.750,00	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan atas Perbaikan Masa Manfaat
1.3.07.01.08.0016	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	2.721.442,50		
1.3.07.01.08.0018	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	12.263.656,25		
1.3.07.01.08.0037	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	911.625,00		
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	6.725.000,00		
1.3.07.01.08.0059	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim	1.684.375,00		
1.3.07.01.08.0067	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	30.010.466,67		
1.3.07.01.08.0068	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils	14.046.164,17		
1.3.07.01.08.0087	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector	20.240.000,00		
1.3.07.01.08.0089	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System	30.246.333,33		
1.3.07.01.08.0100	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System	30.246.333,33		
1.3.07.01.08.0100	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment	595.155,00		
1.3.07.01.08.0111	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Alat Laboratorium Penunjang	1.139.970,00		
1.3.07.01.08.0121	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop	1.824.000,00		
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal		2.638.541,67	
1.3.07.01.03.0033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara		9.828.125,00	
1.3.07.01.03.0037	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Lainnya		1.744.800,00	
1.3.07.01.03.0040	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam		767.287,50	
1.3.07.01.03.0041	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan		1.961.925,00	
1.3.07.01.04.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		39.682.037,50	
1.3.07.01.04.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen		3.128.125,00	
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur		6.971.250,00	
1.3.07.01.07.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum		2.001.041,67	
1.3.07.01.07.0019	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir		925.212,75	
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas		53.414.591,84	



Jambi, 30 Juni 2025

Kapala Dinas,

Dr. H. KEMAS MUHAMMAD ZULFI, M. SI
NIP.19731212 199302 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Lejend Suprpto No. 28, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979, 63137. Fax. (0741) 62627. Kotak Pos 153

SURAT KETERANGAN

Nomor : 889 /DISPERINDAG-1.2/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. KEMAS MUHAMMAD FUAD, M. Si
NIP. : 19731212 199302 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Selaku Pengguna Barang

Dengan ini menerangkan bahwa:

No	Nomor Kodefikasi	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah (Rp)	Keterangan
PERALATAN DAN MESIN					
1.	1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
	1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga			
	1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran		3.996.000,-	Tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, aset tersebut memenuhi kriteria sebagai aset ekstrakomptabel karena memiliki nilai perolehan di bawah batas kapitalisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan reklasifikasi aset dimaksud ke dalam Beban Ekstrakomptabel.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Jambi
Pada tanggal 31 Desember 2025



KEPALA DINAS,

Drs. H. KEMAS MUHAMMAD FUAD, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP.19731212 199302 1 001



SURAT KETERANGAN UTANG BELANJA

Nomor : S-38/KET.PERINDAG-1.2/I/2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. KEMAS MUHAMMAD FUAD, M.Si
NIP : 19731212 199302 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (VI/c)
Jabatan : Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran

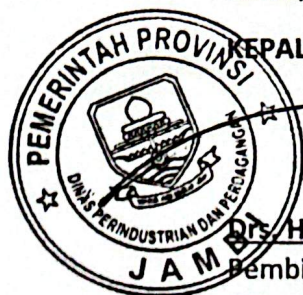
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nilai utang Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon dan Internet) sebesar Rp. **19.810.073,00** yang dicatat pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan perincian :

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Belanja Tagihan Air	Rp 2.029.425,-
2	Belanja Tagihan Listrik	Rp 17.228.060,-
3	Belanja Kawat/Faksimili/Telpon/Internet/TV Berlangganan	Rp 552.588,-
JUMLAH		Rp 19.810.073,-

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 20 Januari 2026



KEPALA DINAS,

Drs. H. KEMAS MUHAMMAD FUAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731212 199302 1 001

NO	TAGIHAN	NO. PELANGGAN	NAMA PELANGGAN	KETERANGAN
01	10000000000000000000			
02	10000000000000000000			
03	10000000000000000000			
04	10000000000000000000			
05	10000000000000000000			
06	10000000000000000000			
07	10000000000000000000			
08	10000000000000000000			
09	10000000000000000000			
10	10000000000000000000			
11	10000000000000000000			
12	10000000000000000000			
13	10000000000000000000			
14	10000000000000000000			
15	10000000000000000000			
16	10000000000000000000			
17	10000000000000000000			
18	10000000000000000000			
19	10000000000000000000			
20	10000000000000000000			
21	10000000000000000000			
22	10000000000000000000			
23	10000000000000000000			
24	10000000000000000000			
25	10000000000000000000			
26	10000000000000000000			
27	10000000000000000000			
28	10000000000000000000			
29	10000000000000000000			
30	10000000000000000000			
31	10000000000000000000			
32	10000000000000000000			
33	10000000000000000000			
34	10000000000000000000			
35	10000000000000000000			
36	10000000000000000000			
37	10000000000000000000			
38	10000000000000000000			
39	10000000000000000000			
40	10000000000000000000			
41	10000000000000000000			
42	10000000000000000000			
43	10000000000000000000			
44	10000000000000000000			
45	10000000000000000000			
46	10000000000000000000			
47	10000000000000000000			
48	10000000000000000000			
49	10000000000000000000			
50	10000000000000000000			
51	10000000000000000000			
52	10000000000000000000			
53	10000000000000000000			
54	10000000000000000000			
55	10000000000000000000			
56	10000000000000000000			
57	10000000000000000000			
58	10000000000000000000			
59	10000000000000000000			
60	10000000000000000000			
61	10000000000000000000			
62	10000000000000000000			
63	10000000000000000000			
64	10000000000000000000			
65	10000000000000000000			
66	10000000000000000000			
67	10000000000000000000			
68	10000000000000000000			
69	10000000000000000000			
70	10000000000000000000			
71	10000000000000000000			
72	10000000000000000000			

[illegible]